



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Mei 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUSNIWAN ETRA
2. Jabatan : SEKRETARIS HAKIM KONSTITUSI
3. NHK : 137501

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 650.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/42 m2 di KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/37 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 147.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2012, WARISAN Rp. 100.000.000
2. MOTOR, VESPA VESPA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. MOTOR, VESPA VESPA Tahun 1961, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOTOR, VESPA VESPA Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERTAHAP** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 7.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 804.000.000**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 804.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **TIDAK LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **20 Februari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.